

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pengendalian internal memegang peranan penting dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja dan pencapaian tujuan suatu organisasi. Untuk memastikan keberadaan dan menjamin pengendalian internal berjalan dengan baik di suatu organisasi, maka diperlukan auditor internal. Dalam melakukan kegiatan audit, seorang auditor harus memiliki independensi serta objektivitas. Independensi dan objektivitas bagi auditor internal bertujuan agar dalam melaksanakan pekerjaan, auditor memandang untuk kepentingan organisasi secara keseluruhan, bukan memihak kepada pihak tertentu.

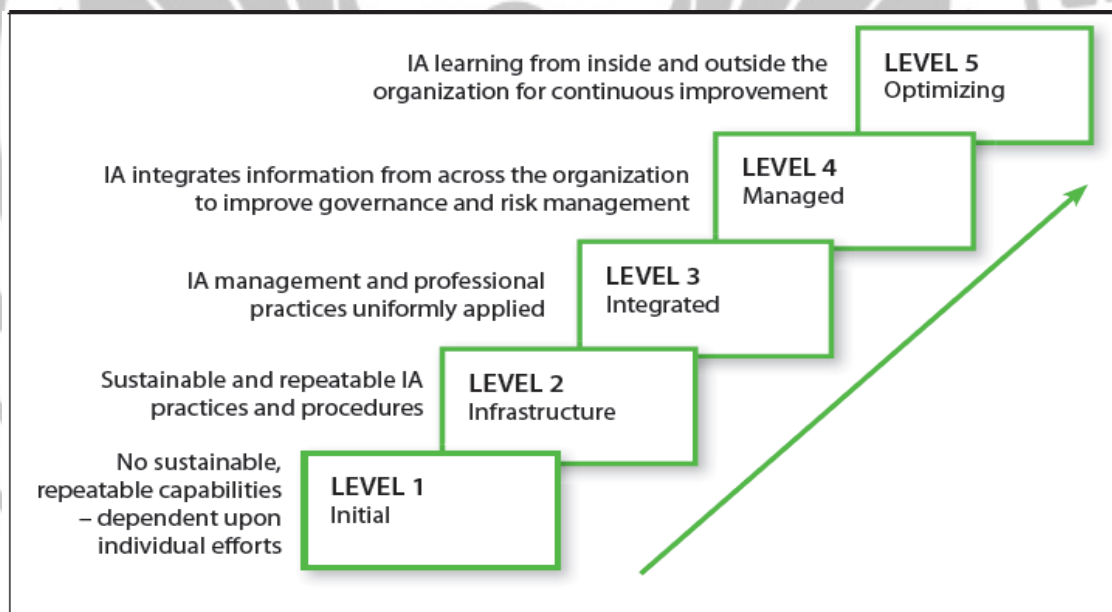
Keberadaan auditor internal memiliki peran yang strategis dalam membantu pemerintah untuk mencapai *good governance*. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengamanatkan kepada seluruh tingkat pimpinan baik di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian terhadap seluruh kegiatan di instansinya. Seluruh aktivitas kegiatan pengendalian harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efektif dan efisien. Untuk memperkuat sistem pengendalian yang memadai, maka pemerintah perlu memperkuat peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Untuk itu auditor internal dalam hal ini APIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah perlu memiliki kapabilitas yang dapat membantu kinerja instansi melalui berbagai tindakan sesuai kapasitas APIP agar pemerintah dapat melaksanakan kegiatan secara ekonomis, efektif dan efisien.

Berdasarkan pedoman teknis Penilaian mandiri kapabilitas APIP yang merupakan bagian dari Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 6 Tahun 2015, dijelaskan bahwa:

Kapabilitas APIP adalah Kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

The Institute of Internal Auditors (IIA) telah mengembangkan kerangka yang digunakan untuk menilai kapabilitas auditor internal yaitu *Internal Audit Capability Model* (IA-CM). IA-CM digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan fundamental bagi audit internal di sektor publik. IA-CM merupakan model yang universal sehingga model tersebut dapat diterapkan secara global termasuk untuk menilai kapabilitas APIP. Berdasarkan IIA tingkatan IA-CM dapat dilihat sebagaimana Gambar I.01.

Gambar I.01 Tingkatan IA-CM



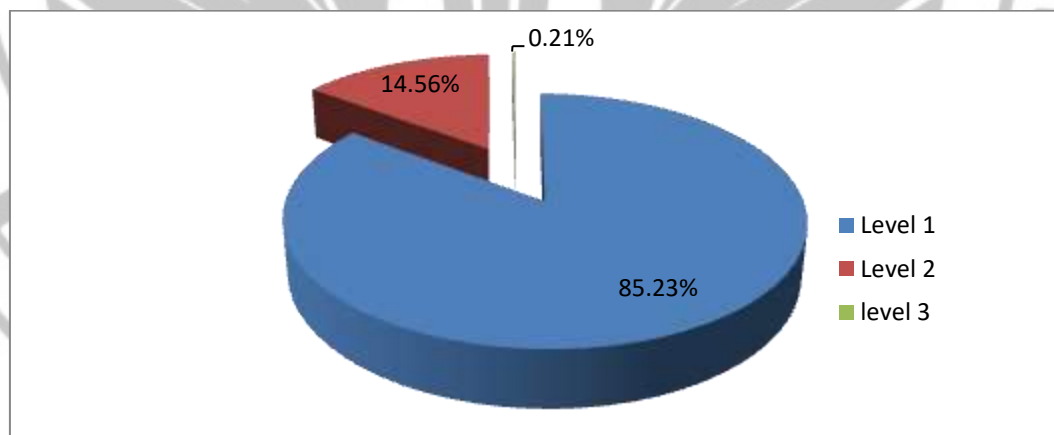
Sumber : *The Institute of Internal Auditors Research Foundation* , *Internal Audit Capability Model* (IA-CM), (Florida: The IIARF, 2009).

IA-CM yang dikembangkan oleh IIA, selanjutnya diadopsi oleh BPKP untuk melakukan penilaian terhadap kapabilitas APIP baik di Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah. Untuk itu, BPKP telah mengeluarkan peraturan yaitu Peraturan

Kepala BPKP Nomor 6 tahun 2015 tentang *Grand Design* Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah tahun 2015-2019. Peraturan tersebut merupakan pedoman serta acuan bagi APIP di Indonesia dalam upaya menilai maupun meningkatkan kapabilitasnya.

Berdasarkan Warta Pengawasan BPKP (2015, 5) hasil penilaian tingkat kapabilitas APIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah per 31 Desember 2014 yang dilakukan oleh BPKP, sebesar 85,23% APIP berada pada Level-1, kemudian 14,56% berada pada Level-2, dan sebesar 0,21% yang berada pada Level-3. Apabila dilihat pada level kapabilitas APIP dalam IA-CM, 85,23 APIP belum mampu memberikan jaminan terhadap proses tata kelola sesuai peraturan, artinya APIP belum memiliki kemampuan yang memadai dalam mendorong *stakeholder* baik itu Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk dapat menjalankan kegiatan secara efektif, ekonomis dan efisien. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa praktik tata kelola pemerintah di Indonesia masih rentan untuk berjalan tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gambaran perolehan tingkat Kapabilitas APIP di Indonesia sebagaimana tersaji dalam Gambar I. 02.

Gambar I. 02 Diagram Persentase Kapabilitas APIP Indonesia per 31 Desember 2014



Sumber : Warta Pengawasan Volume 3 Tahun 2015

Sementara itu berdasarkan Warta Pengawasan BPKP (2015, 5) arahan Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Internal Pemerintah Tahun 2015 dengan tema “Peningkatan Kapabilitas

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Dalam Rangka Mengawal Akuntabilitas Pembangunan Nasional”, sesuai dengan target RPJMN 2015-2019 diharapkan seluruh APIP telah berada pada Level-3 pada tahun 2019.

Berdasarkan hasil *self assessment* terhadap kapabilitas APIP per 31 Desember 2014, kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Bogor masih berada pada level-1. Dengan masih beradanya APIP Kabupaten Bogor di level-1 menunjukkan bahwa APIP Inspektorat Kabupaten Bogor belum menjalankan peran mereka untuk mendorong upaya perbaikan atas tata kelola pemerintah. Kondisi tersebut cukup mengecewakan karena Kabupaten Bogor adalah Kabupaten yang memiliki lokasi dekat dengan Ibu Kota Negara Jakarta. Dengan akses informasi dan infrastruktur yang mudah untuk mencapai Ibu Kota, seharusnya Kabupaten Bogor lebih mudah untuk belajar dalam meningkatkan kapabilitas APIP-nya.

Indikator kualitas APIP dapat kita lihat dari opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pengawasan (IHPS) Semester I Tahun 2015, opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bogor adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kondisi tersebut tidak berbeda dengan opini yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan tahun 2010 sampai dengan 2013. Berdasarkan data yang diperoleh dari IHPS Semester 1 2015 BPK, pemberian opini WDP untuk laporan keuangan tahun 2014 dikarenakan masih lemahnya pengelolaan asset tetap dan asset lainnya, serta belanja daerah. Belum mampunya Pemerintah Kabupaten Bogor memperbaiki kualitas Laporan Keuangan dari WDP menuju WTP memberikan indikasi bahwa Inspektorat Kabupaten Bogor belum memiliki kemampuan memadai untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan keuangan dengan baik. Kurangnya kemampuan APIP Inspektorat Kabupaten Bogor menunjukkan kapabilitas APIP yang belum mampu memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah. Perkembangan Opini BPK atas LKPD Kabupaten Bogor 2010-2014 adalah sesuai dengan Tabel I. 01.

Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Bogor tidak sejalan dengan tugas dan fungsi dari audit internal. Inspektorat Kabupaten/Kota diharapkan melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan

tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan APBD kabupaten/kota. Dengan masih rendahnya level kapabilitas pada APIP Inspektorat Kabupaten Bogor, hal ini menandakan bahwa APIP di daerah tersebut belum mampu berperan secara signifikan dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mencegah potensi adanya korupsi.

Tabel I. 01 Perbandingan Opini BPK atas LKPD Kabupaten Bogor 2010-2014

LKPD	2010	2011	2012	2013	2014
Kabupaten Bogor	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP

Sumber : IHPS Semester 1 2015 BPK

Oleh karena hal tersebut perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut untuk mengetahui tingkat kapabilitas Aparat Internal Pengawasan Pemerintah pada Kabupaten Bogor.

B. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembahasan penelitian akan difokuskan kepada penilaian kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Bogor, serta strategi untuk mencapai kapabilitas level-3 tahun 2019.
2. Objek penelitian adalah Inspektorat Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
3. Responden yang akan dijadikan fokus penelitian adalah APIP di lingkungan Inspektorat Kabupaten Bogor.

C. Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Bogor pada saat ini?
2. Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Bogor dalam meningkatkan kapabilitas APIP mencapai level-3 di lingkungannya?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Bogor.
2. Untuk mengetahui apa saja tantangan dan hambatan dalam pencapaian level 3 kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Bogor
3. Untuk merumuskan langkah-langkah yang perlu di lakukan Inspektorat Kabupaten Bogor agar mencapai level-3 pada tahun 2019.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah dan memperkaya pengetahuan akademis dan menjadi acuan dalam meningkatkan kapabilitas APIP.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi acuan bagi Inspektorat Kabupaten Bogor dalam meningkatkan kapabilitas APIP-nya.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi Inspektorat Kabupaten Bogor mengenai strategi dalam meningkatkan kapabilitas APIP-nya menjadi level-3 di tahun 2019

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini akan disusun ke dalam lima bab. Setiap bab akan berisi pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan yang menggambarkan garis besar/pokok-pokok pembahasan secara menyeluruh.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan menguraikan mengenai teori-teori yang diambil dari literatur-literatur yang dianggap memiliki relevansi dengan permasalahan yang dihadapi. Bab ini juga akan menjelaskan mengenai tujuan penilaian kapabilitas APIP, penilaian kapabilitas APIP dengan Internal Audit

Capability Model (IA-CM), serta elemen-elemen IA-CM.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan tentang metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian. Metode yang digunakan tersebut berisi tentang teknik pengumpulan data, teknik validitasi data dan teknik pengolahan data.

BAB IV EVALUASI KAPABILITAS AUDITOR INTERNAL PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR

Pada bab ini akan diuraikan mengenai analisis terkait topik yang diteliti, dengan penjelasan yang bersifat analisis dan evaluatif, serta ide solusi, pendapat, dan/atau usulan mengenai topik yang diteliti.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini akan menjelaskan simpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan, serta memberikan saran-saran perbaikan yang dipandang perlu.